



DINAS KESEHATAN
Provinsi Sumatera Barat

RENJA 2024

**Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Barat**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renja Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Dinas Kesehatan tahun lalu yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini adalah untuk memberi gambaran rencana kerja satu tahun kedepan yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan di Sumatera Barat

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini dan semoga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Padang, 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat



Dr Lila Yanwar, MARS
NIP. 19720330 200212 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 103 ayat (1) menyatakan : Rancangan awal RKPD Provinsi disusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi dan mengacu kepada RPJM Nasional. Selanjutnya pada pasal 287 ayat (1) menyatakan, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Disamping itu penyusunan ini juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Daerah Sumatera Barat dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Dinas Kesehatan. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahap yaitu: Persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan awal Renja, Penyusunan rancangan renja, Perumusan rancangan akhir renja dan Penetapan Renja OPD.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja OPD, orientasi mengenai Renja penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal OPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Renja OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 mengintegrasikan program-program pemerintah pusat dan Kab/Kota dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Sustainable Development Goals (SDGs) serta mempertimbangkan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah ada sebelumnya.

1.1. Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6 Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 10 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 11 Pergub Nomor 33 Tahun 2022 tentang uraian tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi.

Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan sebagai panduan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat serta untuk efektifitas proses perencanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan kesehatan guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai Acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 Dinas Kesehatan dalam melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dipaparkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Kajian terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun 2022 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Akuntabilitas keuangan yang diterima Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat juga dibahas pada bab ini. Dalam rancangan awal Renja OPD terdapat 10 indikator kinerja utama untuk tahun 2021-2026 yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama dalam Renstra 2021-2026.

Pada Tahun 2022, alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 176.799.110.976,- dan Belanja Modal Rp. 16.556.879.346,-. Belanja Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 9.938.802.000 terdiri dari 5 Program dengan 17 kegiatan dengan rincian sbb :

Tabel. 2.1
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					63.533.097.888	59.885.670.839	94,26
1.02.01.1.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					845.231.089	717.965.040	84,94
1.02.01.1.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1. UUD no 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional 2. Permenkes no 7 tahun 2014 tentang perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan	1 Dokumen, 19 kab kota	1 Dokumen, 19 kab kota	100%	743.462.089	639.759.840	86,05
1.02.01.1.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1. UUD no 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional 2. Permenkes no 7 tahun 2014 tentang perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	64.750.000	61.523.300	95,02
1.02.01.1.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1. UUD no 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional 2. Permenkes no 7 tahun 2014 tentang perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan	5 laporan	5 laporan	100%	37.019.000	16.681.900	45,06
1.02.01.1.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					41.546.396.501	39.993.976.847	96,26
1.02.01.1.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977	403 Orang	396 orang	100%	40.793.278.601	39.270.267.497	96,27

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Gubernur No 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat						
1.02.01.1.02.02.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	31 Orang	33 orang	100%	753.117.900	723.709.350	96,1
1.02.01.1.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH					397.763.826	364.182.660	91,56
1.02.01.1.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,	12 Unit	14 Unit	100%	196.500.000	186.657.000	94,99

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah						
1.02.01.1.03.04.	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	201.263.826	177.525.660	88,21
1.02.01.1.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH					480.047.000	406.758.448	84,73
1.02.01.1.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Permendagri No. 27 Tahun 2021	434 Stel (dinkes), 62 Stel (Labkes), 45 stel (BKOM) 118 Stel (RS Paru)	409 Stel (dinkes), 62 Stel (Labkes), 46 stel (BKOM) 118 Stel (RS Paru)	100% (dinkes, Bkom). 74,19% (labkes)	459.450.000	397.481.748	86,51
1.02.01.1.05.10.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Permendagri No. 27 Tahun 2021	2 kali	1 kali	50%	20.597.000	9.276.700	45,04
1.02.01.1.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					3.096.228.354	2.539.348.149	82,01

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1.02.01.1.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Permendagri No. 27 Tahun 2021	50 set, 100 rol box, 152 lusin, 1352 buah (dinkes), 10 Roll, 1174 buah (BKOM) 3 Unit 124 buah 20 set (RS Paru)	50 set, 100 rol box, 152 lusin, 1352 buah (dinkes), 10 Roll, 1174 buah (BKOM) 3 Unit 124 buah 20 set (RS Paru)	100%	133.777.000	129.649.064	96,91
1.02.01.1.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Permendagri No. 27 Tahun 2021	13 Unit, 5 pkt buah btl bks psg pak (Dinkes), 40 Tabung (BKOM), 5 unit (BKIM) 1 Imbar, 20 buah 24 meter 8 set 16 unit (RS Paru)	13 Unit, 5 pkt buah btl bks psg pak (Dinkes), 47 Tabung (BKOM), 5 unit (BKIM) 1 Imbar, 20 buah 24 meter 8 set 16 unit (RS Paru)	95%	1.231.444.054	1.081.361.950	87,81
1.02.01.1.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Permendagri No. 27 Tahun 2021	10 titik set lengkap (Dinkes) 12 bulan (RS Paru)	10 titik set lengkap (Dinkes) 12 bulan (RS Paru)	100%	50.000.000	48.521.650	97,04
1.02.01.1.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Permendagri No. 27 Tahun 2021	205 Rim, 260 buah, 1616 kali lusin kotak (dinkes), 300 kali 2943 buah 330 RIM 501 kotak 264 pcs (BKOM) 1 pkt 6 set (RS Paru)	205 Rim, 260 buah, 1616 kali lusin kotak (dinkes), 300 kali 2943 buah 330 RIM 501 kotak 264 pcs (BKOM) 1 pkt 6 set (RS Paru)	100%	403.225.100	361.075.280	89,55

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1.02.01.1.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Permendagri No. 27 Tahun 2021	200 rim, 80.000 lbr ktk (Dinkes) 10 buku, 43020 lembar, 70 Rim 30 Pak 24 Unit (BKOM) 100 RIM 100 Kotak 40 rb lembar 250 buah (RS Paru)	200 rim, 80.000 lbr ktk (Dinkes) 10 buku, 43020 lembar, 70 Rim 30 Pak 24 Unit (BKOM) 100 RIM 100 Kotak 40 rb lembar 250 buah (RS Paru)	95%	180.000.000	158.942.383	88,3
1.02.01.1.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Permendagri No. 27 Tahun 2021	50 bahan bacaan (Dinkes) 4 media (BKOM) 4 Eksemplar (RS Paru)	50 bahan bacaan (Dinkes) 4 media (BKOM) 4 Eksemplar (RS Paru)	90%	48.000.000	22.390.000	46,65
1.02.01.1.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Permenpan RB No. 58 / 2022	285 laporan (dinkes) 28 Laporan (BKOM) 250 Dokumen (RS Paru)	285 laporan (dinkes) 28 Laporan (BKOM) 250 Dokumen (RS Paru)	80%	1.049.782.200	737.407.822	70,24
1.02.01.1.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					1.070.271.480	753.456.080	70,4
1.02.01.1.07.05.	PENGADAAN MEUBEL	Perpresno.12 tahun 2021	85 nilai (dinkes), 1 buah, 1 set, 10 unit (RS Paru)	85 nilai (dinkes), 1 buah, 1 set, 10 unit (RS Paru)	100%	717.403.800	410.148.000	57,17
1.02.01.1.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Perpresno.12 tahun 2021	100 %, 32 Unit	100 %, 32 Unit	100%	352.867.680	343.308.080	97,29
1.02.01.1.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5.493.030.467	4.720.829.354	85,94

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1.02.01.1.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Peraturan pemerintah RI No.62 tahun 2012	250 kg, 550 Materai, 7000 surat (Dinkes) 500 Surat (BKOM) 2000 surat (RS Paru)	250 kg, 550 Materai, 7000 surat (Dinkes) 500 Surat (BKOM) 2000 surat (RS Paru)	100%	98.850.000	88.214.250	89,24
1.02.01.1.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Peraturan pemerintah RI No.62 tahun 2012	5730 menit unit per tahun, 9520 M3, 400.000 Kwh (Dinkes) 2 Rekening 2 Rekening 2 rekening 20 KVA (BKOM) 12 bulan (RS Paru)	5730 menit unit per tahun, 9520 M3, 400.000 Kwh (Dinkes) 2 Rekening 2 Rekening 2 rekening 20 KVA (BKOM) 12 bulan (RS Paru)	100%	1.911.282.619	1.485.390.453	77,72
1.02.01.1.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Perpres no. 98 tahun 2020	12 Bulan, 48 kali (Dinkes) 16 orang (BKOM) 24 kali 3 Bulan 12 bulan (RS paru)	12 Bulan, 48 kali (Dinkes) 16 orang (BKOM) 24 kali 3 Bulan 12 bulan (RS paru)	100%	3.482.897.848	3.147.224.651	90,36
1.02.01.1.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.764.456.595	2.620.508.965	94,79
1.02.01.1.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Pergub No.25 tahun 2018	16 Asuransi service, 16 unit bbm pajak (dinkes) 4 Unit (BKOM) 4 Unit (RS Paru)	16 Asuransi service, 16 unit bbm pajak (dinkes) 4 Unit (BKOM) 4 Unit (RS Paru)	100%	393.621.050	361.991.683	91,96

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1.02.01.1.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Pergub No.25 tahun 2018	2 Unit (Dinkes) 1 Unit (BKOM) 1 unit (BKIM) 4 Gedung (RS Paru)	2 Unit (Dinkes) 1 Unit (BKOM) 1 unit (BKIM) 4 Gedung (RS Paru)	100%	1.870.027.509	1.854.017.867	99,14
1.02.01.1.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Pergub No.25 tahun 2018	1 kegiatan (Dinkes), 1 Unit 80 buah (BKOM) 1 unit AC central, 7 unit AC Split, 1 Set Hydran, 1 unit Soud system 1 unit ginset, 1 set IPAL, 7 Unit PC, 1 Unit CCTV, 1 unit gas medis, 3 unit lift, 5 unit printer (RS Paru)	1 kegiatan (Dinkes), 1 Unit 80 buah (BKOM) 1 unit AC central, 7 unit AC Split, 1 Set Hydran, 1 unit Soud system 1 unit ginset, 1 set IPAL, 7 Unit PC, 1 Unit CCTV, 1 unit gas medis, 3 unit lift, 5 unit printer (RS Paru)	100%	500.808.036	404.499.415	80,77
1.02.01.1.10.	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD					7.839.672.576	7.768.645.296	99,09
1.02.01.1.10.01.	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1. PP, NO 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLUD) 2. Permendagri No 79 tahun 2018 tentang BLUD	12 Bulan (Labkes) 1 unit kerja (BKIM)	12 Bulan (Labkes) 1 unit kerja (BKIM)	100%	7.839.672.576	7.768.645.296	99,09
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					180.079.643.208	162.158.429.739	90,05

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1.02.02.1.01.	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI					33.994.460.959	27.724.072.423	81,55
1.02.02.1.01.01.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Dokumen (BKIM) 2 paket (RS Paru)	0 Dokumen (BKIM) 2 paket (RS Paru)	65%	147.356.300	21.035.780	14,28
1.02.02.1.01.02.	PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 unit (BKOM) 2 Paket (RS Paru)	1 unit (BKOM) 2 Paket (RS Paru)	100%	1.611.769.600	1.349.230.983	83,71
1.02.02.1.01.06.	PENGEMBANGAN PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK (PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK, GUGUS PULAU, PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TELEMEDICINE, DLL)	Permenkes Nomor 90 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil.	2 kab kota	2 kab kota	100%	216.576.000	205.052.100	94,68
1.02.02.1.01.08.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	Kepmenkes No.1426/Menkes/SK/X/2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekes	1 Unit	1 Unit	100%	50.000.000	49.012.000	98,02
1.02.02.1.01.10.	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	1. PMK Nomor 198/PMK.07/2021 Pasal 37 tentang Pengelolaan DAK Fisik 2. PMK Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik di Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 3. SE Gubernur Nomor 900/407/perbend-Aklap/BPKAD/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban belanja	16 unit, 100 persen (labkes) 4 Unit (BKIM) 93 Unit (RS Paru)	16 unit, 100 persen (labkes) 0 Unit (BKIM) 93 Unit (RS Paru)	85%	16.021.499.902	13.015.264.512	81,24

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. Pepres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah						
1.02.02.1.01.11.	PENGADAAN SARANA DI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	1. PMK Nomor 198/PMK.07/2021 Pasal 37 tentang Pengelolaan DAK Fisik 2. PMK Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik di Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 3. SE Gubernur Nomor 900/407/perbend-Aklap/BPKAD/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022	1 unit, 2 unit, 1 unit, 3 unit (dinkes).	1 unit, 2 unit, 1 unit, 3 unit (dinkes).	100%	490.546.700	393.977.568	80,31
1.02.02.1.01.14.	PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LAINNYA (SPREI, HANDUK DAN HABIS PAKAI LAINNYA)	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pepres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	400 meter 500 buah (BKOM) 4 jenis (RS Paru)	400 meter 500 buah (BKOM) 4 jenis (RS Paru)	100%	219.521.066	213.938.477	97,46
1.02.02.1.01.15.	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KESEHATAN/PERALATAN LABORATORIUM KESEHATAN	PMK Nomor 198/PMK.07/2021 Pasal 37 tentang Pengelolaan DAK Fisik PMK Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik di Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022	1 keg (bahan kimia), 17 alat	1 keg (bahan kimia), 17 alat	100%	2.784.574.500	2.700.335.231	96,97

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		SE Gubernur Nomor 900/407/perbend-Aklap/BPKAD/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022						
1.02.02.1.01.16.	PENGADAAN BARANG PENUNJANG OPERASIONAL RUMAH SAKIT	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peppres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	72 unit (RS Paru)	72 unit (RS Paru)	100%	800.000.000	732.200.850	91,53
1.02.02.1.01.17.	PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	PMK Nomor 198/PMK.07/2021 Pasal 37 tentang Pengelolaan DAK Fisik PMK Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik di Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 SE Gubernur Nomor 900/407/perbend-Aklap/BPKAD/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022	3 alat (Dinkes), 211 alat (RS Paru)	3 alat (Dinkes), 211 alat (RS Paru)	100%	375.000.000	323.608.222	86,3
1.02.02.1.01.21.	DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN SERTA FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	Permenkes Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023	19 kab kota	19 kab kota	100%	161.730.000	146.548.426	90,61
1.02.02.1.01.22.	PENGADAAN OBAT, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN SERTA FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	Kepmenkes No.189/Menkes/III/2006 Tentang Kebijakan Obat Nasional (KONAS) Kepmenkes No.1426/Menkes/SK/X/2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekes Permenkes No. 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan,	2 paket, 2 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket (dinkes) 5 Paket (RS Paru)	2 paket, 2 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket (dinkes) 5 Paket (RS Paru)	100%	11.115.886.891	8.573.868.274	77,13

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Permenkes No. 5 Tahun 2019 Tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah						
1.02.02.1.02.	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI					144.641.231.349	133.335.789.897	92,18
1.02.02.1.02.01.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	1. Permenkes 75 tahun 2018 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan 2. UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. PP 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana 4. Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang sistem komando penanggulangan darurat bencana	19 kab kota, 19 kab kota, 19 kab kota 33 RS, 80 orang	19 kab kota, 19 kab kota, 19 kab kota 33 RS, 80 orang	100%	3.659.734.882	2.759.660.470	75,41
1.02.02.1.02.02.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	- PMK no 1501 th 2010 tentang jenis penyakit menular yg dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya - UU no 4 th 1984 tentang wabah penyakit menular - Permendagri no 59 th 2021 tentang penerapan SPM - RPJMD Provinsi Sumatera Barat th 2021 – 2026 - Renstra Dinkes 2021- 2026	100 orang, 57 orang	80 orang, 50 orang	100%	147.018.080	118.702.440	80,74

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		- Renja Dinkes 2022 IKU Kadinkes						
1.02.02.1.02.03.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.Permenkes no 21 tahun 2021 ttg pelayanan kesehatan masa sebelum hamil 2.Permenkes Nomor 59 tahun 2021 ttg SPM 3.Permenkes no 97 tahun 2014 ttg persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 4.Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 ttg Upaya Kesehatan Anak	75 orang, 19 KK, 210 Orang, 208 Orang, 255 Orang	19 KK, 210 Orang, 180 orang, 255 orang	90%	427.674.965	345.631.734	80,82
1.02.02.1.02.04.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF	1.SKB 4 Menteri Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 ttg pembinaan dan pengembangan UKS /Madrasah 2.SKB 4 Menteri ttg pembelajaran di masa pandemi covid-19 Nomor 05/KB /2021 Nomor 1347/Tahun 2021 Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021 Nomor 443-5847 Tahun 2021 2.Permenkes 21 Tahun 2021 ttg pelayanan kesehatan masa sebelum hamil 3.Permenkes Nomor 59 tahun 2021 ttg SPM	3 Jenis, 19 Kab kota, 3 kali	3 Jenis, 19 Kab kota, 3 kali	90%	150.000.000	108.765.275	72,51
1.02.02.1.02.06.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	1. Permenkes No. 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) 2. Prepres No.72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan stunting 3. SK Gubernur. No.440.746.2022 Perihal : Perubahan atas Keputusan Gubernur No. 440.746.2022 Tentang	19 kab kota, 10 kab kota, 25 orang, 10 kab kota	19 Kab/Kota, 7 Kab/Kota, 20 orang, 9 Kab/Kota	90%	11.553.554.202	9.593.000.176	83,03

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		Perubahan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Prov. Sumbar Tahun 2022 4. Permenkes No.66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan gangguan Tumbuh Kembang Anak						
1.02.02.1.02.07.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	UU no 36 tahun 2009 tetang kesehatan Impres no 1 tahun 2017 tentang Germas PP no 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja	100 orang (dinkes) 100 orang (BKOM)	97 orang (dinkes) 100 orang (BKOM)	98,5%	194.640.000	157.614.106	80,98
1.02.02.1.02.08.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	UU no 36 tahun 2009 tetang kesehatan PP no 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan Permenkes no 3 tahun 2014 tentang STBM Peraturan bersama menteri dalam negeri dan menteri Kesehatan no 34 tahun 2005 dengan no 1138/menkes/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan kab kota Sehat Pergub no 74 tahun 2021 tentang pengawasan dan pelaksanaan STBM Permenkes no 32 tahun 2017 tentang Standar baku mutu kesehatn lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiyene sanitasi, kolam renang, solus per aqua dan pemandian umum	2 angkatan, 6 kab kota, 19 kab kota, 5 kab kota, 7 kab kota (Dinkes) 1 Paket (RS Paru)	1 Angkatan, 4 kab kota, 19 kab kota, 5 kab kota, 5 kab kota (Dinkes) 1 Paket (RS Paru)	78% (dinkes)	1.881.578.400	983.592.094	52,27
1.02.02.1.02.10.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI DAN TRADISIONAL LAINNYA	1. PP No.103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 2. PP no.47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.Permenkes No.9 tahun 2016 Tentang Upaya Pengembangan Kesehatan	19 kab kota, 38 orang	19 kab kota, 38 orang	100%	176.326.100	154.725.120	87,75

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Keterampilan Permenkes No.61 tahun 2016 tentang Pelayanan kesehatan tradisional Empiris 4.Permenkes No. 37 tahun 2017 Tentang Pelayanan kesehatan tradisional Integrasi 5.Permenkes No. 15 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan tradisional komplementer						
1.02.02.1.02.11.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	permenkes 1501 tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan upaya penanggulangannya Permenkes no 71 tahun 2015 dengan 4 pilar , Promosi kesehatan , deteksi dini, perlindungan khusus dan penanganan kasuf	19 kab kota, 2 keg, 1 keg, 1 keg, 140 orang (Dinkes) 1 kegiatan (RS Paru)	19 kab kota, 2 keg, 1 keg, 1 keg, 140 orang (Dinkes))1 kegiatan (RS Paru)	100%	597.731.400	525.403.361	87,9
1.02.02.1.02.12.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI	1. UU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 2. Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan haji. 3. PP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyekenggaraan Ibadah Haji	17 kab kota, 21 orang	17 kab kota, 21 orang	100%	178.334.500	156.208.190	87,59
1.02.02.1.02.13.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Pasal 1 (3) Tentang Kesehatan Jiwa	19 kab kota, 55 orang	19 kab kota, 55 orang	100%	104.700.600	86.042.150	82,18
1.02.02.1.02.14.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN KECANDUAN NAPZA	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan	19 kab kota, 2 keg, 3 keg, 60 orang, 1 keg	19 kab kota	100%	738.823.068	490.063.755	66,33

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.						
1.02.02.1.02.15.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS	- UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Permenkes 19 tahun 2016 tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu	3 kali kunjungan	3 kali kunjungan	100%	605.438.840	121.980.433	20,15
1.02.02.1.02.16.	PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	- UU no 40 th 2004 tentang JKN - UU no 24 th 2011 tentang BPJS - PP 76 th 2015 tentang Perubahan atas PP no 111 th 2011 tentang tentang BPJS - Perpres no 64 th 2020 tentang Jaminan Kesehatan - Permendagri no 84 th 2022 tentang pedoman penyusunan APBD - PERDA no 10 th 2011 tentang Jaminan Sumbang Sakato - Pergub no 50 th 2014	19 kab kota, 4 kali, 2488592 orang	19 Kab Kota, 4 Kali, 27860177 jiwa	100 %	112.771.613.206	107.737.201.925	95,54
1.02.02.1.02.17.	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	- PMK no 1501 th 2010 tentang jenis penyakit menular yg dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya UU no 4 th 1984 tentang wabah penyakit menular - RPJMD Provinsi Sumatera Barat th 2021 – 2026 - Renstra Dinkes 2021- 2026 - Renja Dinkes 2022 - IKU Kadinkes	19 kab kota, 298 orang	19 kab kota, 247 orang	100%	640.989.981	483.485.833	75,43
1.02.02.1.02.18.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN LINTAS KABUPATEN/KOTA	Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM Permenkes no 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan	19 kab kota, 96 orang	19 kab kota, 96 orang	100%	94.879.750	78.071.600	82,28

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1.02.02.1.02.19.	PEMBINAAN PELAKSANAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	1. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 2. PP No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasitan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1128 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 5. Permenkes 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	1920472 orang, 19 kab kota, 75 Dinkes dan RS, 19 kab kota (Dinkes) 65 dokumen 39 puskesmas 39 SD (BKIM)	33 RS pemerintah (Dinkes) 65 dokumen 39 puskesmas 39 SD (BKIM)	100%	5.118.288.975	4.702.868.601	91,88
1.02.02.1.02.21.	INVESTIGASI LANJUTAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL OLEH KABUPATEN/KOTA	- PMK no 12 th 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi - Permendagri no 59 th 2021 tentang penerapan SPM - RPJMD - Renstra Kemenkes no 2020- 2024 - Renstra Dinkes - Perda no 4 th 2016 tentang penyelenggaraan imunisasi. IKU Kadinkes	139 orang, 83 orang, 1035 orang, 135 orang, 57 orang, 100%	92 orang, 80 orang, 712 orang, 93 orang, 50 orang, 100%	100%	1.757.517.400	1.616.625.126	91,98
1.02.02.1.02.22.	OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasitan	120 juta rp, 2 Org, 100 %, 100 % (BKIM) 12 Bulan (RS Paru)	120 juta rp, 2 Org, 100 %, 100 % (BKIM) 12 Bulan (RS Paru)	100%	3.049.896.000	2.534.356.725	83,1
1.02.02.1.02.25.	PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LAB RUJUKAN/NASIONAL	- PMK no 1501 th 2010 tentang jenis penyakit menular yg dapat	300 spesimen	300 spesimen	100%	6.310.000	6.308.400	99,97

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya - UU no 4 th 1984 tentang wabah penyakit menular						
1.02.02.1.02.27.	PENDAMPINGAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	3. PMK no 46 th 2016 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi . Peraturan menteri kesehatan ri nomor 61 th 2017 tentang petunjuk teknis dak nonfisik kesehatan tahun anggaran 2018 4. PMK 43 th 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. UU no 44 tahun 2009 tentang RS 6. PMK no 12 th 2020 Pasal 3 7. PP, NO 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLUD) 8. Permendagri No 79 tahun 2018 tentang BLUD 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 10. Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi	306 peserta, 10 puskesmas, 75 dinkes dan RS, 19 kab kota	236 peserta, 38 dinkes, 19 Kab Kota, 10 Puskesmas	77,12%	786.181.000	575.482.383	73,2
1.02.02.1.03.	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI					479.720.500	453.662.800	94,57
1.02.02.1.03.01.	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN	1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 050-876-2022 tentang Pembentukan penyelenggaran satu data Indonesia Tingkat provinsi Sumatera barat 2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;	17 kab kota, 1 kali	17 kab kota	100%	7.709.100	4.589.100	59,53

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		3. Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan						
1.02.02.1.03.03.	PENGADAAN ALAT/PERANGKAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN JARINGAN INTERNET	Peraturan pemerintah RI nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem informasi kesehatan.	10 unit	10 unit	100%	472.011.400	449.073.700	95,14
1.02.02.1.04.	PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI					964.230.400	644.904.619	66,88
1.02.02.1.04.02.	PENINGKATAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan	12 Bulan (RS Paru)	12 Bulan (RS Paru)	100%	223.256.000	201.513.331	90,26
1.02.02.1.04.03.	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan	2 dokumen (Dinkes) 2 dokumen (BKOM) 1 Kegiatan (RS Paru)	Workshop 1 bimtek 1 (labkes) 2 dokumen (BKOM) 1 Kegiatan (RS Paru)	50% (labkes) 100 % (Paru)	740.974.400	443.391.288	59,84
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					2.161.202.550	1.481.631.942	68,56
1.02.03.1.01.	PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI					27.295.500	16.628.800	60,92
1.02.03.1.01.01.	PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. UU nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 2. PP nomor 46 2014 tentang Sistim informasi kesehatan	420 orang	262 orang	62,3%	27.295.500	16.628.800	60,92

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
		3. Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang Sistim kesehatan nasional 4. Peraturan bersama Menkes Ri Mendagri dan Menpan RB tentang Perencanaan dan pemeratan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah						
1.02.03.1.02.	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI					2.133.907.050	1.465.003.142	68,65
1.02.03.1.02.01.	PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Renstra 2020 – 2024 tentang Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya 2. Permenkes nomor 18 tahun 2017 tentang penyelengaran uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	1 kali, 1 kali, 19 kab kota, 2 kli, 1 angkatan, 1 kali, 1 kali (dinkes) 720 orang (BKOM)	1 kali, 1 kali, 19 kab kota, 2 kli, 1 angkatan, 1 kali, 1 kali (dinkes) 720 orang (BKOM)	100%	1.368.241.650	957.263.439	69,96
1.02.03.1.02.02.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Permenkes 33 tahun 2015 tentang Perencanaan SDMK 2. Peraturan bersama Menkes Ri Mendagri dan Menpan RB tentang perencanaan dan pemeratan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah	19 kab kota	19 kab kota	100%	765.665.400	507.739.703	66,31
1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					89.283.850	69.612.215	77,97
1.02.04.1.01.	PENERBITAN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG DAN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)					89.283.850	69.612.215	77,97

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1.02.04.1.01.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN PENGAKUAN PBF CABANG DAN CABANG PAK	Permenkes No.1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan. PMK No. 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Tentang Pedagang Besar Farmasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	55 izin	47 izin	85,45%	89.283.850	69.612.215	77,97
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.343.135.933	2.907.195.535	86,96
1.02.05.1.01.	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI					2.482.649.149	2.198.683.443	88,56
1.02.05.1.01.01.	PENINGKATAN UPAYA ADVOKASI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN, PENGALANGAN KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI	UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan Inpres No 1 tahun 2017 tentang Germas Permen Perencanaan pembangunan Nasional/KABAPENAS RI No 11 tahun 2017 tentang pedoman umum pelaksanaan Germas Hidup sehat	2 jenis, 19 kab kota, 19 kab kota, 7 kali	2 jenis, 19 kab/kota, 7 kali	100%	2.482.649.149	2.198.683.443	88,56
1.02.05.1.02.	PELAKSANAAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH PROVINSI					667.198.834	561.108.342	84,1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1.02.05.1.02.01.	PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan Inpres No 1 tahun 2017 tentang Germas Permen Perencanaan pembangunan Nasional/KABAPENAS RI No 11 tahun 2017 tentang pedoman umum pelaksanaan Germas Hidup sehat	4 jenis, 19 kab kota, 19 kab kota	4 jenis, 19 Kab/Kota	100%	667.198.834	561.108.342	84,1
1.02.05.1.03.	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH PROVINSI					193.287.950	147.403.750	76,26
1.02.05.1.03.01.	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI UKBM	Permenkes no 8 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Permendagri no 19 tahun 2011 tentang Posyandu Permendagri no 54 tahun 2011 tentang Pokjanal	3 jenis, 19 kab kota, 19 kab kota	2 jenis, 19 kab/kota	66%	193.287.950	147.403.750	76,26

Dengan demikian total realisasi anggaran kesehatan (Belanja operasi, belanja modal dan Belanja baran dan jasa) adalah :

- **Realisasi Fisik** : 93 %
- **Realisasi Keuangan** : 90,89 %

Urusan Kesehatan pada Tahun anggaran 2022 dilaksanakan melalui 5 Program dan 17 kegiatan. Untuk mendukung urusan wajib Dinas Kesehatan Tahun 2022 dialokasikan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 249.206.363.429,- dan realisasi Rp.226.502.540.270,46,- (90.89%), dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan 4 UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 target Pendapatan Rp. 12.558.090.000,- dan terealisasi Rp. 10.405.995.813,- (82.82 %), dengan rincian target dan pencapaian sebagai berikut :

Tabel
Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	sis	%
1	UPTD RS PARU	3.400.340.000	2.457.600.459	72,28	942.739.541	27,72
2	UPTD BKOM	403.750.000	460.878.500	114,15	(57.128.0000	(14,15)
3	UPTD BKIM	3.254.000.000	809.301.269	24,87	2.444.698.731	75,13
4	UPTD BALAI LAB KES	5.500.000.000	6.672.799.526	121,32	(1.172.799.526)	(21,32)
TOTAL :		12.558.090.000	10.400.579.754	82,82	2.157.510.246	17,18

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah dialokasikan melalui APBD Tahun 2022 telah dapat terlaksana dengan baik, rata-rata pencapaian realisasi fisik 93 %, dan realisasi keuangan 90.89 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Meningkatnya Mutu Pelayanan kesehatan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 3. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1. Pembinaan Pelayanan Upaya Kesehatan 2. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	1. Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi (Target Kinerja 100 dengan realisasi 100) dengan capaian kinerja 100% 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan (standar 1: 1000). (Target Kinerja 1:875 dengan realisasi 1: 727) dengan capaian kinerja 120%
	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat 2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1. Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	3. Persentase Puskesmas yang terakreditasi (Target Kinerja 97,8 dengan realisasi 97,8) dengan capaian kinerja 100%
	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan /	4. Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ berpotensi bencana. (Target

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
	2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	2. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Berpotensi Bencana pada tahap pra bencana 2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Kinerja 100 dengan realisasi 100) dengan capaian kinerja 100%
Meningkatnya Kesehatan ibu, anak dan kesehatan masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 3. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 4. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1. Pengelolaan kesehatan Ibu dan anak 2. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 4. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	5. Persentase persalinan sesuai standar di fasyankes (Target Kinerja 78,5 dengan realisasi 75,33) dengan capaian kinerja 95,96 %
	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Pengelolaaan kesehatan usia produktif 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 3. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak	6. Persentase Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) (Target Kinerja 13 dengan realisasi 9,7) dengan capaian kinerja 134%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 3. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 4. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 4. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 2. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	7. Akses keluarga dengan sanitasi dasar (Jamban sehat) (Target Kinerja 86 dengan realisasi 85,19) dengan capaian kinerja 99,06%
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Investigasi lanjutan ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh kab/kota 2. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	8. Persentase Imunisasi dasar lengkap pada usia 12 - 23 bulan (Target Kinerja 75 dengan realisasi 87,19) dengan capaian kinerja 116,3 %

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 3. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 4. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	3. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 4. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB	9. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi (Target Kinerja 100 dengan realisasi 100) dengan capaian kinerja 100%
Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	10. Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan. (Target Kinerja 86,1 dengan realisasi 86,18) dengan capaian kinerja 100%.

- A. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Sasaran I :

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi (Target Kinerja 100 dengan realisasi 100) dengan capaian kinerja 100%
- 2) Persentase Puskesmas yang terakreditasi (Target Kinerja 97,8 dengan realisasi 97,8) dengan capaian kinerja 100%
- 3) Rasio Daya Tampung RS Rujukan (standar 1: 1000). (Target Kinerja 1:875 dengan realisasi 1: 727) dengan capaian kinerja 120%
- 4) Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ berpotensi bencana. (Target Kinerja 100 dengan realisasi 100) dengan capaian kinerja 100%

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Upaya Kesehatan \ Output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan evaluasi serta FGD dalam rangka meningkatnya pelayanan Mutu Rumah Sakit di Rumah Sakit kab/kota sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- Sub Kegiatan Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Out put dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya Pertemuan BLUD puskesmas dan Rumah Sakit, Monitoring dan evaluasi pendampingan fasilitas kesehatan di puskesmas. Sub kegiatan ini dilaksanakan pembinaan pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan baik dari segi sarana, prasarana, alat dan SDM di Puskesmas serta berjalannya sistem di puskesmas serta adanya peningkatan capaian cakupan program, penanggulangan/ pemecahan

masalah program yang tidak tercapai dan puskesmas berkomitmen untuk menyiapkan segala sesuatunya menyangkut regulasi, dokumen, observasi, wawancara penilaian yang akan dilakukan oleh Tim Penilai di 19 Kab/Kota. Sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / Berpotensi Bencana pada tahap pra bencana. Out put sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Kab.Kota, terlaksananya monitoring dan evaluasi di Kab/Kota, Rumah Sakit Kab/Kota serta terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana akibat terdampak bencana dan krisis kesehatan di lokasi bencana, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya

- Sub kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 2 tahap dengan jumlah peserta 232 orang, Pelatihan Tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang diikuti 30 orang, Orientasi Manajemen Puskesmas yang diikuti oleh 279 orang, Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan, PertemuanEvaluasi Program Internship dokter Indonesia (PIDI yang diikuti 45 orang, Bimtek Validasi Data SDMK yang diikuti 65 orang dan Pertemuan Evaluasi Program SDMK yang diikuti oleh 45 orang serta Monitoring dan Evaluasi ke 19 Kab/kota Dengan dilaksanakannya kegiatan Uji kompetensi dan Pelatihan Tim Pelatihan Tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan serta Orientasi Manajemen Puskesmas merupakan upaya untuk meningkatkan Kompetensi dan kualifikasi SDMK. sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan kegiatan sebagai berikut : Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
 - Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK.
Output Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Inspeksi dan pengawasan PBF Cabang dan Cabang PAK. Dalam pelaksanaan kegiatan dihasilkan rekomendasi izin untuk PBF Cabang dan Cabang PAK yang mengurus izin dan dilakukan juga monitoring bahwa PBF Cabang dan Cabang PAK sudah melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

2. Sasaran II :

Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase persalinan sesuai standar di fasyankes (Target Kinerja 78,5 dengan realisasi 75,33) dengan capaian kinerja 95,96 %
- b. Persentase Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) (Target Kinerja 13 dengan realisasi 9,02) dengan capaian kinerja 131%
- c. Akses keluarga dengan sanitasi dasar (Jamban sehat) (Target Kinerja 86 dengan realisasi 85,19) dengan capaian kinerja 99,06%

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Sub kegiatan Pengelolaan kesehatan Ibu dan anak
Out put dari sub kegiatan ini adalah Terlaksanya Pertemuan dalam rangka pemantuan pelaksanaan AMPSR (Audit Maternal Perinatal

Surveilans respon), MPDN, dan E-Kohort untuk 6 Kab/Kota, terlaksananya pertemuan koordinasi dalam penguatan implementai pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja disatuan pendidikan penguatan UKS/M, dan terlaksananya FGD percepatan penurunan AKI/AKB serta terlaksananya kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi pencatatan/pelaporan di Kab/Kota di Sumatera Barat. Sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- Sub kegiatan Pengelolaan kesehatan usia produktif
Out Put sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pertemuan program Kesehatan Keluarga pada Masa Pandemi Covid_19 dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor yang terkait pada OPD dan Kab Kota serta terlaksananya Monitoring Evaluasi Program Kesga ke 19 Kab/Kota untuk melihat pencapaian dan pelaksanaan indikator program di 19 kab kota Sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
Out Put Sub kegiatan ini Terlaksananya Pertemuan Edukasi dan Pemberian Makanan Tambahan berbasis Pangan Lokal, terlaksananya pertemuan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Terlaksananya Pertemuan Focus Group (FGD) Penurunan Stunting, Terlaksananya Pertemuan Surveilans Gizi dan KIA, Terlaksananya Pertemuan Raapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Sinkronisasi Data Stunting dan terlaksananya Pengadaan PMT Balita Kurus dan Pengadaan PMT Bumil KEK. Sub kegiatan ini untuk dapat Menurunkan Kasus Balita Gizi Kurang, Menurunnya Kasus Balita Gizi Buruk dan Menurunnya Kasus Balita Stunting di Kabupaten Kota. Sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
Output sub kegiatan ini Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat ; Pertemuan tim Pembina KKS Provinsi, Tim Pembina KKS kab/Kota dan Forum KKS untuk melakukan

evaluasi dan persiapan penilaian KKS tahun 2023, terutama evaluasi terhadap capaian akses sanitasi (jamban sehat) menuju ODF kab/kota yang menjadi prasyarat penilaian KKS tahun 2023, Workshop Sanitasi Layak bagi Tokoh Masyarakat ; Sebagai bentuk kegiatan dalam rangka sosialisasi sanitasi yang layak bagi tokoh masyarakat terutama terhadap kondisi sanitasi tempat ibadah (masjid dan mushala) dalam rangka peningkatan kualitas sarana sanitasi ibadah yang menjadi akses bagi masyarakat yang berada di sekitar tempat ibadah, Orientasi Da'i Sanitasi ; Pertemuan orientasi ini bagi para da'i atau penceramah dalam rangka menjadikan seorang da'i atau penceramah sebagai penyambung informasi Kesehatan kepada masyarakat yang membantu atau mendukung Dinas Kesehatan untuk penyebaran informasi bidang kesehatan seperti ; sanitasi, stunting, penyakit berbasis lingkungan dll melalui wadah – wadah pengajian dan wirid di masyarakat.

Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat ke Kab/Kota dengan melakukan advokasi Kepala Daerah, koordinasi LP/LS dan pelaksanaan Verifikasi ODF kab/kota oleh Tim Verifikasi Provinsi dalam rangka percepatan capaian ODF yang merupakan bentuk komitmen Kepala Daerah dalam peningkatan akses sanitasi menuju sanitasi aman dan layak. ODF merupakan prasyarat yang harus di penuhi oleh Kab/Kota untuk mengikuti penilaian KKS tahun 2023, dengan berbagai upaya yang dilakukan sehingga tahun 2022 ini terjadi peningkatan kab/kota dengan capaian ODF yaitu Kota Padang, Kab. Darmasraya, Kab. Pesisir Selatan dan Kota Pariaman yang memberi peluang untuk provinsi Sumatera Barat yang akan mengikuti penilaian KKS pada tahun 2023 menjadi 9 (sembilan) kab/kota yang telah memenuhi prasyarat ODF.

Orientasi Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) ; Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas puskesmas di beberapa kab/kota dalam rangka pelaksanaan surveilans kualitas air minum dengan memberikan materi dan praktek penggunaan sanitarian kit yang digunakan

dalam pengambilan sampel air minum. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab Dinas Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum masyarakat dalam rangka upaya penurunan stunting di Provinsi Sumatera Barat dengan menjamin kualitas air minum yang di konsumsi oleh masyarakat memenuhi syarat Kesehatan. Sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 2 tahap dengan jumlah peserta 232 orang, Pelatihan Tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang diikuti 30 orang, Orientasi Manajemen Puskesmas yang diikuti oleh 279 orang, Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan, Pertemuan Evaluasi Program Internship dokter Indonesia (PIDI yang diikuti 45 orang, Bimtek Validasi Data SDMK yang diikuti 65 orang dan Pertemuan Evaluasi Program SDMK yang diikuti oleh 45 orang serta Monitoring dan Evaluasi ke 19 Kab/kota Dengan dilaksanakannya kegiatan Uji kompetensi dan Pelatihan Tim Pelatihan Tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan serta Orientasi Manajemen Puskesmas merupakan upaya untuk meningkatkan Kompetensi dan kualifikasi SDMK. sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan kegiatan sebagai berikut : Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

- Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK

Output Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Inspeksi dan pengawasan PBF Cabang dan Cabang PAK. Dalam pelaksanaan

kegiatan dihasilkan rekomendasi izin untuk PBF Cabang dan Cabang PAK yang mengurus izin dan dilakukan juga monitoring bahwa PBF Cabang dan Cabang PAK sudah melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

- Sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Out Put Sub kegiatan ini adalah Terlaksananya advokasi (rapat-rapat koordinasi, edukasi, sosialisasi) dan penggerakan masyarakat (kampanye program prioritas kesehatan) yang menerapkan kebijakan Germas hidup sehat melalui kebijakan germas dan kebijakan yang berwawasan kesehatan di berbagai tatanan (Tatanan tempat kerja, tatanan sekolah, tatanan pelayanan kesehatan, tempat umum, Rumah tangga dan lain-lain) di seluruh Kab kota Sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

3. Sasaran III :

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase Imunisasi dasar lengkap pada usia 12 - 23 bulan (Target Kinerja 75 dengan realisasi 87,71) dengan capaian kinerja 116,3 %
- b. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi (Target Kinerja 100 dengan realisasi 100) dengan capaian kinerja 100%

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Investigasi lanjutan ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh kab/kota

Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor dan pembinaan pelaksanaan Imunisasi rutin di Kabupaten / Kota sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB).

Output sub kegiatan ini adalah tertanggulangnya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit pada lokai KLB di Provinsi Sumatera Barat. sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut :

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya

- Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 2 tahap dengan jumlah peserta 232 orang, Pelatihan Tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang diikuti 30 orang, Orientasi Manajemen Puskesmas yang diikuti oleh 279 orang, Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan, PertemuanEvaluasi Program Internship dokter Indonesia (PIDI yang diikuti 45 orang, Bimtek Validasi Data SDMK yang diikuti 65 orang dan Pertemuan Evaluasi Program SDMK yang diikuti oleh 45 orang serta Monitoring dan Evaluasi ke 19 Kab/kota Dengan dilaksanakannya kegiatan Uji kompetensi dan Pelatihan Tim Pelatihan Tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan serta Orientasi Manajemen Puskesmas merupakan upaya untuk meningkatkan Kompetensi dan kualifikasi SDMK. sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan kegiatan sebagai berikut : Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).

- Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Output Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Inspeksi dan pengawasan PBF Cabang dan Cabang PAK. Dalam pelaksanaan kegiatan dihasilkan rekomendasi izin untuk PBF Cabang dan Cabang PAK yang mengurus izin dan dilakukan juga monitoring bahwa PBF Cabang dan Cabang PAK sudah melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

- Sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi. Out Put Sub kegiatan ini adalah Terlaksananya advokasi (rapat-rapat koordinasi, edukasi, sosialisasi) dan penggerakan masyarakat (kampanye program prioritas kesehatan) yang menerapkan kebijakan Germas hidup sehat melalui kebijakan germas dan kebijakan yang berwawasan kesehatan di berbagai tatanan (Tatanan tempat kerja, tatanan sekolah, tatanan pelayanan kesehatan, tempat umum, Rumah tangga dan lain-lain) di seluruh Kab kota Sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

4. Sasaran IV :

Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan dengan indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan. (Target Kinerja 86,1 dengan realisasi 86,18) dengan capaian kinerja 100%
Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program :

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
Out put dari Sub Kegiatan ini adalah Meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang di daftarkankan oleh Pemda melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Jumlah kepesertaan PBI-JK adalah 1.906.750 peserta, jumlah kepesertaan JKSS 581.391 peserta dengan rincian BBL PEMDA 20% (3.283 peserta), BBL PEMDA 30% (151 peserta), INDUK PEMDA 20% (567.257 peserta), INDUK PEMDA 30% (10.249), PANTI SOSIAL (451 peserta) dan jumlah kepesertaan BANTUAN IURAN PANTI sebesar 451 peserta. sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- a. Penanganan pandemi dan pasca pandemi Covid-19
- b. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman *emerging diseases* akibat tingginya mobilitas penduduk seperti penyakit menular langsung (diare, ISPA/Pneumonia, Kusta, Frambusia) dan penyakit bersumber binatang seperti DBD, Filariasis, Rabies. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat

c. Jumlah kematian Ibu yang masih tinggi

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi merupakan bagian dari kesepakatan global terhadap pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Dengan komitmen ini maka akses ibu hamil dan bersalin terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu menjadi sasaran penting dalam mencapai peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi. Pelayanan Persalinan di Fasilitas (PF) menjadi penting karena penyebab kematian ibu sebagian besar disebabkan oleh karena perdarahan dan infeksi pada saat persalinan, yang seharusnya dapat dicegah bila ibu mendapatkan pelayanan persalinan sesuai dengan standar di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatal esensial belum sesuai standar yang juga memberikan kontribusi pada kematian neonatal dan bayi.

d. Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk (wasting) dan stunting yang masih tinggi

Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk (wasting) dan stunting masih tinggi meskipun telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir namun tetap menjadi isu penting karena sebagai indikator untuk menentukan kualitas Sumber Daya Manusia. Angka Prevalensi balita wasting dan stunting diperoleh dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan sekali 5 (lima) tahun dan dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan setiap tahun. Disamping itu peran Surveilans gizi melalui aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM)

sangat penting dalam melakukan intervensi gizi pada sasaran yang bermasalah gizi. Namun keterisian entry data pada Aplikasi e-PPGBM masih belum optimal. Pelaksanaan posyandu di masa pandemik covid-19 tidak berjalan maksimal (malah ada posyandu yang tutup), dan masih ada posyandu dengan alat antropometri yang tidak lengkap. Hal ini bisa mempengaruhi terhadap validitas hasil pengukuran

- e. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak yang masih rendah dan masih ada kabupaten/kota yang belum ODF
- f. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis tenaga
- g. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis tenaga
- h. Sistem rujukan pelayanan kesehatan masih belum optimal yang dilihat dari masih banyaknya antrian pasien di fasilitas pelayanan kesehatan
- i. Belum semua penduduk di Sumatera Barat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional

Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan atau *supply side* dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menjadi kendala di beberapa daerah, termasuk pembiayaan. Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) adalah kombinasi antara kecukupan

fasyankes dan cakupan kepesertaan JKN. Sampai dengan akhir tahun 2020, dari 19 kabupaten/kotaterdapat 5 Kab kota yang sudah UHC

- j. Belum dimanfaatkannya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan kesehatan Pemanfaatan TIK di bidang kesehatan masih belum optimal dimana data kesehatan belum terintegrasi. Selain itu, beberapa pemanfaatan platform digital seperti telemedicine, telediagnosis dan teknologi kesehatan lainnya juga belum efektif digunakan di semua jenjang pelayanan kesehatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses review tersebut sangat penting untuk

dilakukan agar terjadi konsistensi dan sinkronisasi terhadap tujuan, sasaran seperti yang telah diuraikan diatas. Adanya review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dari perbandingan dokumen rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan sebagaimana lampiran Tabel TC.3

Dari Tabel T-C.31 diatas terdapat beberapa perbedaan program/kegiatan pada rancangan awal RKPD tahun dengan hasil Analisa kebutuhan sebagai berikut:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 secara umum telah mengakomodir program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD. Usulan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan tersebut juga telah di sinkronkan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana yang dibahas pada Forum OPD yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dihadiri oleh pemangku kepentingan. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini mengacu kepada Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tidak lepas dari kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kebijakan Kemenkes sangat berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di provinsi. Sasaran Indikator Kemenkes juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk itu beberapa faktor pendorong dan penghambat yang menyebabkan permasalahan di Dinas Kesehatan Provinsi terkait Sasaran Kemenkes dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi	Pelayanan kesehatan ibu yang belum sesuai standar pelayanan kesehatan neonatal belum sesuai standar	Persalinan di fasilitas kesehatan Pelayanan antenatal care (anc) minimal 4 kali selama hamil
			3. Kompetensi tenaga kesehatan yang belum maksimal	Pelayanan kesehatan neonatalessensial sesuai standar

		Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk(wasting) dan stuntingmasih tinggi	Upaya koodinasi dengan melibatkan Lintas Sektor terkait, pihak luar seperti perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan dunia usaha belum optimal	Adanya pedoman , juklak, juknis pelayanan kesehatan ibu danbayi Adanya dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas petugas melalui dana dekon dan apbd Dukungan Kementerian Kesehatan melalui dana Dekonsentrasi untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam program gizi Adanya Buku Pedoman,Juklakdan Juknis pelaksanaan program gizi Adanya Kerjasama dan koordinasi program dengan kabupaten/kota
2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Belum optimalnya upaya kesehatan yangdilakukan baik Upayakesehatan Perorangandan Upaya Kesehatan Masyarakat : Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasardan rujukan	Belum adanya grand desain/ rencana nduk peningkatan pengembangan sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan di SumateraBarat	Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran
3	Meningkatnya pencegahan dan	Belum maksimalnya dukungan dan koordinasianter SKPD terkait	1.Belum adanya komitmen Pemda daerah dalam	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian

	pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	terhadap pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, terutama penyakit yang akan menuju eliminasi dan eradikasi (Frambusia, Kusta, Hepatitis, Malaria, TB dll)	pemberantasan penyakit menular dan tidak menular 2. Minimnya pendaanaan dalam pemberantasan penyakit menular dan tidak menular 3. Belum adanya perda dalam pemberantasan penyakit menular dan tidak menular 4. Masih tingginya penyakit Emerging Deseas di masyarakat yang belum terdeteksi secara dini 5. Tingginya kasus penyakit tidak menular yang menyebabkan tingginya pembiayaan Kesehatan atau katastropik	penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Belum akuratnya perencanaan kebutuhan obat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan.	Belum optimalnya koordinasi antar SDM program dan Farmasi dalam perhitungan kebutuhan obat program Beberapa daftar obat yang dibutuhkan tidak tersedia dalam e katalog Kesiapan aparatur / pengelola obat dalam mengikuti aturan penganggaran obat melalui dana DAK	Meningkatnya a instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar Percepatan kontrak payung obat e katalog oleh LKPP

5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Masih kurangnya kualitas, kuantitas, dan penyebaran SDM Kesehatan	Perencanaan dan kebijakan pengangkatan PNS tenaga kesehatan masih tercentralisasi di pusat	Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan kesehatan	Belum terjalin kuat hubungan/kerjasama antara pemda dengan filantropi kesehatan dan CSR	PERGUB NO 9 TAHUN 2021 TENTANG JAMKESDA

3.2 .Tujuan dan Sasaran Renja OPD

a. Tujuan

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah maka Dinas Kesehatan merumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Dalam mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dengan indikator sasaran :
 - 1. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 195 puskesmas pada tahun 2023
 - 2. Jumlah Rumah sakit yang terakreditasi sebanyak 7 rumah sakit pada tahun 2023
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran:
 - 1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun sebesar 25,6 % pada tahun 2023
 - 2. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Di Faskes (PF) menjadi 90 % pada tahun 2023.
 - 3. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sesuai Standar menjadi 95 % pada tahun 2023.
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan indikator sasaran :
 - 1. Jumlah Kabupaten kota yang mencapai imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0-11 bulan menjadi 100 % pada tahun 2023
- d. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan dengan Indikator Sasaran :
 - 1. Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dalam Program dan Kegiatan

Mengacu pada Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Program Kegiatan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD 2021-2026 tahun ke empat yang sudah ditetapkan. Usulan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada Renja tahun 2024 meliputi 5 Program dengan 75 kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan berada di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Dinas Kesehatan (BKIM, Labkes, Bapelkes dan RS Paru Lubuk Alung).

4.2. Pendanaan

Total Kebutuhan Dana/Pagu indikatif untuk mendanai kegiatan di tahun 2024 adalah sebesar Rp. 234.757.897.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Rincian rencana program dan kegiatan dan pendanaannya terdapat pada lampiran

Dapat disampaikan bahwa adanya perubahan anggaran antara program yang sudah ditetapkan oleh Bappeda yaitu :

No	REKAPAN PERPROGRAM	Rancangan RKPD	Kebutuhan	Catatan Penting
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	63.892.938.000	75.550.073.307	Ada penambahan anggaran untuk kebutuhan P3K dan Gaji PNS yang pindah
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	166.515.651.000	153.058.515.693	Pengurangan anggaran pada program ini untuk memenuhi kebutuhan gaji dan P3K dan program pemberdayaan kesehatan (Germas)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.755.512.000	1.755.512.000	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	164.664.000	164.664.000	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.429.132.000	4.229.132.000	Penambahan kegiatan untuk kegiatan germas untuk pencegahan stunting
		234.757.897.000	234.757.897.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini merupakan rangkaian pelaksanaan program kerja yang perlu disikapi oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) kesehatan yang perlu dipahami secara komprehensif. Rencana program yang dituangkan dalam langkah ini masih bersifat Indikatif, sehingga diperlukan penjabaran yang lebih operasional kedalam perencanaan kerja tahunan.

Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan ditentukan dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam rencana Kerja (Renja) ini sebagai komitmen untuk mewujudkannya. Seluruh unsur penyelenggaraan Program Pembangunan Kesehatan, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Selain itu perlu diupayakan untuk mencapai Sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program. Oleh karena itu, diharapkan profesionalitas terus ditingkatkan sehingga semangat profesionalisme yang dikembangkan dapat memperlancar pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan pada Tahun 2024, sesuai dengan program/Kegiatan yang sudah dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 tidak ada pengurangan anggaran yang berdampak tidak maksimalnya upaya meningkatkan dan memajukan kesehatan di Sumatera Barat.

Tabel T-C.29										
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Prangkat Daerah dan										
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022										
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023										
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2)	Realisasi Renja Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH									
	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Dokumen, 19 kab kota	NA	1 Dokumen, 19 kab kota	1 Dokumen, 19 kab kota	100%	3 Dokumen		
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	3 Dokumen	NA	3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD		5 laporan	NA	5 laporan	5 laporan	100%	-		
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH									
	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	403 Orang	NA	403 Orang	396 orang	100%	0 -		
	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	31 Orang	NA	31 Orang	33 orang	100%	-		
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH									
	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	12 Unit	NA	12 Unit	14 Unit	100%	0 (Dinkes) 2 Dokumen (RS Paru)		
	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	3 Dokumen	NA	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	-		
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH									
	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	434 Stel (dinkes), 62 Stel (Labkes), 45 stel (BKOM) 118 Stel (RS Paru)	NA	434 Stel (dinkes), 62 Stel (Labkes), 45 stel (BKOM) 118 Stel (RS Paru)	409 Stel (dinkes), 62 Stel (Labkes), 46 stel (BKOM) 118 Stel (RS Paru)	100% (dinkes, Bkom), 74,19% (labkes)	400 Paket (Dinkes) 35 Paket (BKOM)		
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		2 kali	NA	2 kali	1 kali	50%			
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	50 set, 100 rol box, 152 lusin, 1352 buah (dinkes), 10 Roll, 1174 buah (BKOM) 3 Unit 124 buah 20 set (RS Paru)	NA	50 set, 100 rol box, 152 lusin, 1352 buah (dinkes), 10 Roll, 1174 buah (BKOM) 3 Unit 124 buah 20 set (RS Paru)	50 set, 100 rol box, 152 lusin, 1352 buah (dinkes), 10 Roll, 1174 buah (BKOM) 3 Unit 124 buah 20 set (RS Paru)	100%	0 (Dinkes) 1 Paket (BKOM) 1 Paket (RS Paru)		
	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	13 Unit, 5 pkt buah btl bks psg pak (Dinkes), 40 Tabung (BKOM), 5 unit (BKIM) 1 Imbar, 20 buah 24 meter 8 set 16 unit (RS Paru)	NA	13 Unit, 5 pkt buah btl bks psg pak (Dinkes), 40 Tabung (BKOM), 5 unit (BKIM) 1 Imbar, 20 buah 24 meter 8 set 16 unit (RS Paru)	13 Unit, 5 pkt buah btl bks psg pak (Dinkes), 47 Tabung (BKOM), 5 unit (BKIM) 1 Imbar, 20 buah 24 meter 8 set 16 unit (RS Paru)	95%	0 (Dinkes) 1 Paket (BKOM) 1 Paket (RS Paru)		
	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 titik set lengkap (Dinkes) 12 bulan (RS Paru)	NA	10 titik set lengkap (Dinkes) 12 bulan (RS Paru)	10 titik set lengkap (Dinkes) 12 bulan (RS Paru)	100%	4 Paket		

	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	205 Rim, 260 buah, 1616 kali lusin kotak (dinkes), 300 kali 2943 buah 330 RIM 501 kotak 264 pcs (BKOM) 1 pkt 6 set (RS Paru)	NA	205 Rim, 260 buah, 1616 kali lusin kotak (dinkes), 300 kali 2943 buah 330 RIM 501 kotak 264 pcs (BKOM) 1 pkt 6 set (RS Paru)	205 Rim, 260 buah, 1616 kali lusin kotak (dinkes), 300 kali 2943 buah 330 RIM 501 kotak 264 pcs (BKOM) 1 pkt 6 set (RS Paru)	100%	4 Paket (Dinkes) 4 Paket (BKOM) 1 Paket (RS Paru)		
	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	200 rim, 80.000 lbr ktk (Dinkes) 10 buku, 43020 lembar, 70 Rim 30 Pak 24 Unit (BKOM) 100 RIM 100 Kotak 40 rb lembar 250 buah (RS Paru)	NA	200 rim, 80.000 lbr ktk (Dinkes) 10 buku, 43020 lembar, 70 Rim 30 Pak 24 Unit (BKOM) 100 RIM 100 Kotak 40 rb lembar 250 buah (RS Paru)	200 rim, 80.000 lbr ktk (Dinkes) 10 buku, 43020 lembar, 70 Rim 30 Pak 24 Unit (BKOM) 100 RIM 100 Kotak 40 rb lembar 250 buah (RS Paru)	95%	0 (Dinkes) 1 Paket (BKOM) 1 Paket (RS Paru)		
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	50 bahan bacaan (Dinkes) 4 media (BKOM) 4 Eksemplar (RS Paru)	NA	50 bahan bacaan (Dinkes) 4 media (BKOM) 4 Eksemplar (RS Paru)	50 bahan bacaan (Dinkes) 4 media (BKOM) 4 Eksemplar (RS Paru)	90%	0 (Dinkes) 1 Dokumen (BKOM)		
	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	285 laporan (dinkes) 28 Laporan (BKOM) 250 Dokumen (RS Paru)	NA	285 laporan (dinkes) 28 Laporan (BKOM) 250 Dokumen (RS Paru)	285 laporan (dinkes) 28 Laporan (BKOM) 250 Dokumen (RS Paru)	80%	12 Laporan (BKOM) 12 Laporan (BKIM) 12 Laporan (RS Paru)		
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
	PENGADAAN MEBEL	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	85 nilai (dinkes), 1 buah, 1 set, 10 unit (RS Paru)	NA	85 nilai (dinkes), 1 buah, 1 set, 10 unit (RS Paru)	85 nilai (dinkes), 1 buah, 1 set, 10 unit (RS Paru)	100%	4 Paket (Dinkes) 1 Paket (RS Paru)		
	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %, 32 Unit	NA	100 %, 32 Unit	100 %, 32 Unit	100%	0 (Dinkes) 1 Unit (BKOM)		
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	250 kg, 550 Materai, 7000 surat (Dinkes) 500 Surat (BKOM) 2000 surat (RS Paru)	NA	250 kg, 550 Materai, 7000 surat (Dinkes) 500 Surat (BKOM) 2000 surat (RS Paru)	250 kg, 550 Materai, 7000 surat (Dinkes) 500 Surat (BKOM) 2000 surat (RS Paru)	100%	0 (Dinkes) 12 Laporan (BKOM) 12 Laporan (RS Paru)		
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	5730 menit unit per tahun, 9520 M3, 400.000 Kwh (Dinkes) 2 Rekening 2 Rekening 2 rekening 20 KVA (BKOM) 12 bulan (RS Paru)	NA	5730 menit unit per tahun, 9520 M3, 400.000 Kwh (Dinkes) 2 Rekening 2 Rekening 2 rekening 20 KVA (BKOM) 12 bulan (RS Paru)	5730 menit unit per tahun, 9520 M3, 400.000 Kwh (Dinkes) 2 Rekening 2 Rekening 2 rekening 20 KVA (BKOM) 12 bulan (RS Paru)	100%	0 (Dinkes) 4 Laporan (BKOM) 12 Laporan (BKIM) 12 Laporan (RS Paru)		
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	12 Bulan, 48 kali (Dinkes) 16 orang (BKOM) 24 kali 3 Bulan 12 bulan (RS paru)	NA	12 Bulan, 48 kali (Dinkes) 16 orang (BKOM) 24 kali 3 Bulan 12 bulan (RS paru)	12 Bulan, 48 kali (Dinkes) 16 orang (BKOM) 24 kali 3 Bulan 12 bulan (RS paru)	100%	0 (Dinkes) 12 Laporan (BKOM) 12 Laporan (RS Paru)		
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	16 Asuransi service, 16 unit bbm pajak (dinkes) 4 Unit (BKOM) 4 Unit (RS Paru)	NA	16 Asuransi service, 16 unit bbm pajak (dinkes) 4 Unit (BKOM) 4 Unit (RS Paru)	16 Asuransi service, 16 unit bbm pajak (dinkes) 4 Unit (BKOM) 4 Unit (RS Paru)	100%	6 Unit (Dinkes) 3 Unit (BKOM) 5 Unit (RS Paru)		
	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	2 Unit (Dinkes) 1 Unit (BKOM) 1 unit (BKIM) 4 Gedung (RS Paru)	NA	2 Unit (Dinkes) 1 Unit (BKOM) 1 unit (BKIM) 4 Gedung (RS Paru)	2 Unit (Dinkes) 1 Unit (BKOM) 1 unit (BKIM) 4 Gedung (RS Paru)	100%	2 Unit (Dinkes) 1 Unit (BKOM) 1 Unit (BKIM) 2 Unit (RS Paru)		

	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 kegiatan (Dinkes), 1 Unit 80 buah (BKOM) 1 unit AC central, 7 unit AC Split, 1 Set Hydran, 1 unit Soud system 1 unit ginset, 1 set IPAL, 7 Unit PC, 1 Unit CCTV, 1 unit gas medis, 3 unit lift, 5 unit printer (RS Paru)	NA	1 kegiatan (Dinkes), 1 Unit 80 buah (BKOM) 1 unit AC central, 7 unit AC Split, 1 Set Hydran, 1 unit Soud system 1 unit ginset, 1 set IPAL, 7 Unit PC, 1 Unit CCTV, 1 unit gas medis, 3 unit lift, 5 unit printer (RS Paru)	1 kegiatan (Dinkes), 1 Unit 80 buah (BKOM) 1 unit AC central, 7 unit AC Split, 1 Set Hydran, 1 unit Soud system 1 unit ginset, 1 set IPAL, 7 Unit PC, 1 Unit CCTV, 1 unit gas medis, 3 unit lift, 5 unit printer (RS Paru)	100%	1 Unit (Dinkes) 1 Unit (BKOM) 1 Unit (BKIM) 1 Unit (RS Paru)		
	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD									
	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD		12 Bulan (Labkes) 1 unit kerja (BKIM)	NA	12 Bulan (Labkes) 1 unit kerja (BKIM)	12 Bulan (Labkes) 1 unit kerja (BKIM)	100%	1 Unit Kerja (Labkes) 1 Unit Kerja (BKIM) 1 Unit Kerja (RS)		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI									
	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA		1 Dokumen (BKIM) 2 paket (RS Paru)	NA	1 Dokumen (BKIM) 2 paket (RS Paru)	0 Dokumen (BKIM) 2 paket (RS Paru)	65%			
	PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA		1 unit (BKOM) 2 Paket (RS Paru)	NA	1 unit (BKOM) 2 Paket (RS Paru)	1 unit (BKOM) 2 Paket (RS Paru)	100%	1 Unit (Labkes) 2 Unit (BKOM) 1 Unit (BKIM) 1 Unit (RS Paru)		
	PENGEMBANGAN PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK (PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK, GUGUS PULAU, PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TELEMEDICINE, DLL)	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	2 kab kota	NA	2 kab kota	2 kab kota	100%	2 Layanan		
	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA		1 Unit	NA	1 Unit	1 Unit	100%			
	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN		16 unit, 100 persen (labkes) 4 Unit (BKIM) 93 Unit (RS Paru)	NA	16 unit, 100 persen (labkes) 4 Unit (BKIM) 93 Unit (RS Paru)	16 unit, 100 persen (labkes) 0 Unit (BKIM) 93 Unit (RS Paru)	85%	1 Unit (BKOM)		
	PENGADAAN SARANA DI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN		1 unit, 2 unit, 1 unit, 3 unit (dinkes).	NA	1 unit, 2 unit, 1 unit, 3 unit (dinkes).	1 unit, 2 unit, 1 unit, 3 unit (dinkes).	100%	1 Unit (Labkes) 1 Unit (BKIM) 1 Unit (RS Paru)		
	PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LAINNYA (SPREI, HANDUK DAN HABIS PAKAI LAINNYA)		400 meter 500 buah (BKOM) 4 jenis (RS Paru)	NA	400 meter 500 buah (BKOM) 4 jenis (RS Paru)	400 meter 500 buah (BKOM) 4 jenis (RS Paru)	100%	1 Paket (Labkes) 2 Paket (BKOM) 1 Paket (BKIM)		
	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KESEHATAN/PERALATAN LABORATORIUM KESEHATAN		1 keg (bahan kimia), 17 alat	NA	1 keg (bahan kimia), 17 alat	1 keg (bahan kimia), 17 alat	100%	30 Unit (Labkes) 1 Unit (BKIM) 4 Unit (RS Paru)		
	PENGADAAN BARANG PENUNJANG OPERASIONAL RUMAH SAKIT		72 unit (RS Paru)	NA	72 unit (RS Paru)	72 unit (RS Paru)	100%			

PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN		3 alat (Dinkes), 211 alat (RS Paru)	NA	3 alat (Dinkes), 211 alat (RS Paru)	3 alat (Dinkes), 211 alat (RS Paru)	100%	4 Unit (Labkes) 5 Unit (BKOM) 1 Unit (BKIM) 30 Unit (RS Paru)		
DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN SERTA FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	19 kab kota	NA	19 kab kota	19 kab kota	100% -			
PENGADAAN OBAT, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN SERTA FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	2 paket, 2 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket (dinkes) 5 Paket (RS Paru)	NA	2 paket, 2 paket, 1 paket, 1 paket (dinkes) 5 Paket (RS Paru)	2 paket, 2 paket, 1 paket, 1 paket (dinkes) 5 Paket (RS Paru)	100%	0 (Dinkes) 1 Paket (RS Paru)		
PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI									
PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	19 kab kota, 19 kab kota, 19 kab kota 33 RS, 80 orang	NA	19 kab kota, 19 kab kota, 19 kab kota 33 RS, 80 orang	19 kab kota, 19 kab kota, 19 kab kota 33 RS, 80 orang	100%	1000 Orang		

	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	100 orang, 57 orang	NA	100 orang, 57 orang	80 orang, 50 orang	100%	64000 Orang		
	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	75 orang, 19 KK, 210 Orang, 208 Orang, 255 Orang	NA	75 orang, 19 KK, 210 Orang, 208 Orang, 255 Orang	19 KK, 210 Orang, 180 orang, 255 orang	90%	3 Dokumen		
	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	3 Jenis, 19 Kab kota, 3 kali	NA	3 Jenis, 19 Kab kota, 3 kali	3 Jenis, 19 Kab kota, 3 kali	90%	2 Dokumen		
	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	19 kab kota, 10 kab kota, 25 orang, 10 kab kota	NA	19 kab kota, 10 kab kota, 25 orang, 10 kab kota	19 Kab/Kota, 7 Kab/Kota, 20 orang, 9 Kab/Kota	90%	4 Dokumen		
	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	100 orang (dinkes) 100 orang (BKOM)	NA	100 orang (dinkes) 100 orang (BKOM)	97 orang (dinkes) 100 orang (BKOM)	98.50%	2 Dokumen (Dinkes) 2 Dokumen (BKOM)		

	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	2 angkatan, 6 kab kota, 19 kab kota, 5 kab kota, 7 kab kota (Dinkes) 1 Paket (RS Paru)	NA	2 angkatan, 6 kab kota, 19 kab kota, 5 kab kota, 7 kab kota (Dinkes) 1 Paket (RS Paru)	1 Angkatan, 4 kab kota, 19 kab kota, 5 kab kota, 5 kab kota (Dinkes) 1 Paket (RS Paru)	78% (dinkes)	5 Dokumen (Dinkes) 1 Dokumen (RS Paru)		
	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI DAN TRADISIONAL LAINNYA	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	19 kab kota, 38 orang	NA	19 kab kota, 38 orang	19 kab kota, 38 orang	100%	2 Dokumen		
	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	19 kab kota, 2 keg, 1 keg, 1 keg, 140 orang (Dinkes) 1 kegiatan (RS Paru)	NA	19 kab kota, 2 keg, 1 keg, 1 keg, 140 orang (Dinkes) 1 kegiatan (RS Paru)	19 kab kota, 2 keg, 1 keg, 1 keg, 140 orang (Dinkes))1 kegiatan (RS Paru)	100%	10 Dokumen (Dinkes) 1 Dokumen (RS Paru)		
	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	17 kab kota, 21 orang	NA	17 kab kota, 21 orang	17 kab kota, 21 orang	100%	1 Dokumen		

	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang	19 kab kota, 55 orang	NA	19 kab kota, 55 orang	19 kab kota, 55 orang	100%	1 Dokumen		
	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN KECANDUAN NAPZA	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	19 kab kota, 2 keg, 3 keg, 60 orang, 1 keg	NA	19 kab kota, 2 keg, 3 keg, 60 orang, 1 keg	19 kab kota	100%	1000 Orang		
	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	3 kali kunjungan	NA	3 kali kunjungan	3 kali kunjungan	100%	3 Dokumen		
	PENGLOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	19 kab kota, 4 kali, 2488592 orang	NA	19 kab kota, 4 kali, 2488592 orang	19 Kab Kota, 4 Kali, 27860177 jiwa	100%	2 Dokumen		

	PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	19 kab kota, 298 orang	NA	19 kab kota, 298 orang	19 kab kota, 247 orang	100%	2 Dokumen		
	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN LINTAS KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	19 kab kota, 96 orang	NA	19 kab kota, 96 orang	19 kab kota, 96 orang	100%	2 Dokumen		
	PEMBINAAN PELAKSANAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	1920472 orang, 19 kab kota, 75 Dinkes dan RS, 19 kab kota (Dinkes) 65 dokumen 39 puskesmas 39 SD (BKIM)	NA	1920472 orang, 19 kab kota, 75 Dinkes dan RS, 19 kab kota (Dinkes) 65 dokumen 39 puskesmas 39 SD (BKIM)	33 RS pemerintah (Dinkes) 65 dokumen 39 puskesmas 39 SD (BKIM)	100%	2 Dokumen (Dinkes) 4 Dokumen (BKIM)		
	INVESTIGASI LANJUTAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL OLEH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	139 orang, 83 orang, 1035 orang, 135 orang, 57 orang, 100%	NA	139 orang, 83 orang, 1035 orang, 135 orang, 57 orang, 100%	92 orang, 80 orang, 712 orang, 93 orang, 50 orang, 100%	100%	2 Dokumen		

	OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT		120 juta rp, 2 Org, 100 %, 100 % (BKIM) 12 Bulan (RS Paru)	NA	120 juta rp, 2 Org, 100 %, 100 % (BKIM) 12 Bulan (RS Paru)	120 juta rp, 2 Org, 100 %, 100 % (BKIM) 12 Bulan (RS Paru)	100%	12 Dokumen (RS Paru)		
	PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LAB RUJUKAN/NASIONAL		300 spesimen	NA	300 spesimen	300 spesimen	100%			
	PENDAMPINGAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN		306 peserta, 10 puskesmas, 75 dinkes dan RS, 19 kab kota	NA	306 peserta, 10 puskesmas, 75 dinkes dan RS, 19 kab kota	236 peserta, 38 dinkes, 19 Kab Kota, 10 Puskesmas	77.12%	2 Dokumen		
	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI									
	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	17 kab kota, 1 kali	NA	17 kab kota, 1 kali	17 kab kota	100%	2 Dokumen		
	PENGADAAN ALAT/PERANGKAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN JARINGAN INTERNET	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	10 unit	NA	10 unit	10 unit	100%	6 Unit		
	PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI									
	PENINGKATAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT	-	12 Bulan (RS Paru)	NA	12 Bulan (RS Paru)	12 Bulan (RS Paru)	100%	30 Unit (Dinkes) 1 Unit (BKIM)		
	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	-	2 dokumen (Dinkes) 2 dokumen (BKOM) 1 Kegiatan (RS Paru)	NA	2 dokumen (Dinkes) 2 dokumen (BKOM) 1 Kegiatan (RS Paru)	Workshop 1 bimtek 1 (labkes) 2 dokumen (BKOM) 1 Kegiatan (RS Paru)	50% (labkes) 100 % (Paru)	30 Unit (Dinkes) 3 Unit (Labkes) 2 Unit (BKOM) 1 Unit (RS Paru)		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
	PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI									
	PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	420 orang	NA	420 orang	262 orang	62.30% -			

PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI									
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	1 kali, 1 kali, 19 kab kota, 2 kli, 1 angkatan, 1 kali, 1 kali (dinkes) 720 orang (BKOM)	NA	1 kali, 1 kali, 19 kab kota, 2 kli, 1 angkatan, 1 kali, 1 kali (dinkes) 720 orang (BKOM)	1 kali, 1 kali, 19 kab kota, 2 kli, 1 angkatan, 1 kali, 1 kali (dinkes) 720 orang (BKOM)	100%	0 (Dinkes) 200 Orang (BKOM)		
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	19 kab kota	NA	19 kab kota	19 kab kota	100%	-		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									
PENERBITAN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG DAN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)									
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN PENGAKUAN PBF CABANG DAN CABANG PAK	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	55 izin	NA	55 izin	47 izin	85.45%	-		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI									
PENINGKATAN UPAYA ADVOKASI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN, PENGGALANGAN KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat	2 jenis, 19 kab kota, 19 kab kota, 7 kali	NA	2 jenis, 19 kab kota, 19 kab kota, 7 kali	2 jenis, 19 kab/kota, 7 kali	100%	4 Dokumen		
PELAKSANAAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH PROVINSI									
PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat	4 jenis, 19 kab kota, 19 kab kota	NA	4 jenis, 19 kab kota, 19 kab kota	4 jenis, 19 Kab/Kota	100%	2 Dokumen		
PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH PROVINSI									
BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI UKBM	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	3 jenis, 19 kab kota, 19 kab kota	NA	3 jenis, 19 kab kota, 19 kab kota	2 jenis, 19 kab/kota	66%	2 Dokumen		

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2023	2024	
1	Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi			100	100	100	100	100	100				
2	Persentase Puskesmas yang terakreditasi			97.8	98.2	98.5	98.9	100	97.8				
3	Rasio daya tampung RS rujukan (Standar 1:1000)		V	1:875	1:875	1:875	1:875	1:875	1:727				
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	V		100	100	100	100	100	100				
5	Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes			78.5	80	82	84	86	75.33				
6	Presentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)			13	11.5	10	8.5	7	9.3				
7	Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat)			86	89	92	95	100	85.19				
8	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 12-23 Bulan			75	80	85	90	95	87.71				
9	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	V		100	100	100	100	100	100				
10	Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan			86.1	88.2	90.3	92.4	95	86.18				

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Umas Kesenian Provinsi Sumatera Barat		Analisa Kebutuhan							
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan	
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							196,214,132,998	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							196,214,132,998
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							57,846,390,557	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							57,846,390,557
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						566,953,909	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						566,953,909	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	441,114,239	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	441,114,239	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	65,839,670	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	65,839,670	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	60,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	60,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Terbit Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Terbit Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terbit Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terbit Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	
	Administrasi Keuangan						50,325,078,079	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						50,325,078,079	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	0	Persentase Terbit Administrasi Keuangan	100 %	49,689,855,149	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	0	Persentase Terbit Administrasi Keuangan	100 %	49,689,855,149	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terbit Administrasi Keuangan	100 %	518,820,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terbit Administrasi Keuangan	100 %	518,820,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terbit Administrasi Keuangan	100 %	62,322,330	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terbit Administrasi Keuangan	100 %	62,322,330	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Persentase Terbit Administrasi Keuangan	100 %	54,080,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Terbit Administrasi Keuangan	100 %	54,080,600	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						453,762,600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						453,762,600	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terbit Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	205,030,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terbit Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	205,030,000	

No	Rancangan Awal RKPD							Analisa Kebutuhan						
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	248,732,600	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	248,732,600
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						350,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						350,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	350,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	350,000,000
	Administrasi Umum						1,219,151,849	Administrasi Umum						1,219,151,849
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	47,590,060	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	47,590,060
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	58,489,585	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	58,489,585
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	45,314,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	45,314,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	201,246,250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	201,246,250
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	41,720,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	41,720,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	33,940,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	33,940,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	60,425,977	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	60,425,977
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	730,425,977	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	730,425,977
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						870,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						870,000,000
	Pengadaan Mebel	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	570,000,000	Pengadaan Mebel	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	570,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	300,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	300,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan						2,421,344,120	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan						2,421,344,120
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	36,465,002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	36,465,002
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	744,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	744,600,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,640,279,118	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,640,279,118

No	Rancangan Awal RKPD							Analisa Kebutuhan						
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,620,100,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,620,100,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	377,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	377,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	1,000,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	1,000,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	243,100,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	243,100,000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						132,484,540,341	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						132,484,540,341
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						4,175,792,500	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						4,175,792,500
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100 000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	586,001,500	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100 000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	586,001,500

Rancangan Awal RKPD							Analisa Kebutuhan								
Program Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	154,146,000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	154,146,000		
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	3,435,645,000	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	3,435,645,000		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						126,694,404,941	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						126,694,404,941		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	525,786,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	525,786,000		

No	Rancangan Awal RKPD							Analisa Kebutuhan						
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepreetaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	176,856,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepreetaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	176,856,000
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepreetaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Tersedia	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	565,059,250	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepreetaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	565,059,250
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						600,000,000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						600,000,000
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-	-	300,000,000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-	-	300,000,000
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-	-	300,000,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-	-	300,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1,489,406,100	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1,489,406,100
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						288,084,250	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						288,084,250

No	Rancangan Awal RKPD							Analisa Kebutuhan						
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	A strata 530 Orang 87 %	288,084,250	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	A strata 530 Orang 87 %	288,084,250
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						1,201,321,850	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						1,201,321,850
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	A strata 530 Orang 87 %	856,709,100	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	A strata 530 Orang 87 %	856,709,100
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	A strata 530 Orang 87 %	344,612,750	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	A strata 530 Orang 87 %	344,612,750
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						164,664,000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						164,664,000
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)						52,121,400	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)						52,121,400
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	100 % 100 %	52,121,400	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	100 % 100 %	52,121,400
	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)						112,542,600	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)						112,542,600
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	100 % 100 %	112,542,600	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	100 % 100 %	112,542,600
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						4,229,132,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						4,229,132,000
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						2,846,789,200	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						2,846,789,200

No	Rancangan Awal RKPD							Analisa Kebutuhan						
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan gemas hidup sehat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gemas hidup sehat	14 kabupate n/kota 11 % 11 %	2,846,789,200	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan gemas hidup sehat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gemas hidup sehat	14 kabupate n/kota 11 % 11 %	2,846,789,200
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi						821,002,220	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi						821,002,220
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan gemas hidup sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab/Kota	14 kabupate n/kota 11 % 11 %	821,002,220	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan gemas hidup sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab/Kota	14 kabupate n/kota 11 % 11 %	821,002,220
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi						561,340,580	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi						561,340,580
	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan gemas hidup sehat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan UKBM	14 kabupate n/kota 11 % 11 %	561,340,580	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan gemas hidup sehat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan UKBM	14 kabupate n/kota 11 % 11 %	561,340,580
UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat							8,950,000,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,950,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,950,000,000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2,950,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2,950,000,000
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						2,770,000,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						2,770,000,000
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	250,000,000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	250,000,000

Rancangan Awal RKPD							Analisa Kebutuhan								
Program Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/n/kota 18 kabupaten/n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	100,000,000	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/n/kota 18 kabupaten/n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	100,000,000	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/n/kota 18 kabupaten/n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	170,000,000	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/n/kota 18 kabupaten/n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	170,000,000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/n/kota 18 kabupaten/n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	2,000,000,000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/n/kota 18 kabupaten/n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	2,000,000,000	

Rancangan Awal RKPD							Analisa Kebutuhan								
Program Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	250,000,000	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	250,000,000	
			Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)			Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA				Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria			Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						180,000,000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						180,000,000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NIM) Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	100 % 14 % 76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 %	180,000,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NIM) Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	100 % 14 % 76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 %	180,000,000	
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita			Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)				Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)			Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA		Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						6,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						6,000,000,000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD							Peningkatan Pelayanan BLUD							
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase layanan BLUD yang dilakukan	100 %	6,000,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase layan BLUD yang dilakukan	100 %	6,000,000,000	
UPTD BKOM & Pelkes							4,145,527,590	UPTD BKOM & Pelkes							4,145,527,590
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						919,687,557	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						919,687,557	

Rancangan Awal RKPD							Analisa Kebutuhan								
Program Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						759,606,900	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						759,606,900	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	190.512.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	190.512.000		
Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	350.000.000	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	350.000.000		
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	69.094.900	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	69.094.900		

No	Rancangan Awal RKPD						Analisa Kebutuhan							
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencl yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah daerah terpencl yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	150,000,000	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencl yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah daerah terpencl yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	150,000,000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						81,800,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						81,800,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencl yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	81,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencl yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	81,800,000
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						78,280,657	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						78,280,657

No	Rancangan Awal RKPD						Analisa Kebutuhan								
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan	
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten n/kota 18 kabupaten n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	78,280,657	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten n/kota 18 kabupaten n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	78,280,657	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						266,105,900	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							266,105,900
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						266,105,900	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							266,105,900
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	A strata 530 Orang 87 %	266,105,900	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	A strata 530 Orang 87 %	266,105,900	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2,959,734,133	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							2,959,734,133
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							70,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	70,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	70,000,000	
	Administrasi Umum						172,488,800	Administrasi Umum							172,488,800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	28,895,600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	28,895,600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	20,383,200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	20,383,200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	68,574,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	68,574,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	20,800,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	20,800,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4,320,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4,320,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	29,516,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	29,516,000	

Rancangan Awal RKPD								Analisa Kebutuhan							
Program Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						120,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						120,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	120,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	120,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,018,423,182	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,018,423,182	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15,960,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15,960,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	345,032,064	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	345,032,064	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	657,431,118	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	657,431,118	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,578,822,151	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,578,822,151	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	28,200,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	28,200,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	1,500,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	1,500,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	50,622,151	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	50,622,151	
UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat							5,796,482,000	UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat							5,796,482,000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,900,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,900,000,000	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							1,500,000,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						1,500,000,000	

Rancangan Awal RKPD							Analisa Kebutuhan								
Program Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/n/kota 18 kabupaten/n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	250,000,000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/n/kota 18 kabupaten/n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	250,000,000		
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/n/kota 18 kabupaten/n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	150,000,000	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/n/kota 18 kabupaten/n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	150,000,000		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						250,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							250,000,000	
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut	8,7 % 76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/n/kota 18 kabupaten/n/kota 38 % 100 % 96 % 83 % 100 % 100 % 100 % 14 %	250,000,000	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	8,7 % 76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/n/kota 18 kabupaten/n/kota 38 % 100 % 96 % 83 % 100 % 100 % 100 % 14 %	250,000,000		

No	Rancangan Awal RKPD						Analisa Kebutuhan											
	Program Kegiatan		Lokasi		Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan		Lokasi		Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							150,000,000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								150,000,000	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	150,000,000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	150,000,000				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							3,896,482,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								3,896,482,000	
	Administrasi Umum							86,482,000	Administrasi Umum								86,482,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terbit Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	86,482,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terbit Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	86,482,000				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							150,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								150,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	150,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	150,000,000				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							160,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								160,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	100,000,000				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	60,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	60,000,000				
	Peningkatan Pelayanan BLUD							3,500,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD								3,500,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase layanan BLUD yang dilakukan	100 %	3,500,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase layanan BLUD yang dilakukan	100 %	3,500,000,000				
	UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat							19,651,754,412	UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat							19,651,754,412		

No	Rancangan Awal RKPD						Analisa Kebutuhan							
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						14,804,287,795	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						14,804,287,795
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						11,235,409,795	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						11,235,409,795
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	6,364,403,976	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	6,364,403,976
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	-Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	1,250,000,000	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	-Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	1,250,000,000

Rancangan Awal RKPD							Analisa Kebutuhan								
Program Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten n/kota 18 kabupaten n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	1.000,000,000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten n/kota 18 kabupaten n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	1.000,000,000		
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten n/kota 18 kabupaten n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	500,000,000	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten n/kota 18 kabupaten n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	500,000,000		
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten n/kota 18 kabupaten n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	2.121.005,819	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Jumlah daerah terampil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten n/kota 18 kabupaten n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	2.121.005,819		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						3.299.222.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						3.299.222.000		

No	Rancangan Awal RKPD						Analisa Kebutuhan								
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan	
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	269,656,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah saki yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupate n/kota 18 kabupate n/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	269,656,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						4,847,466,617	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							4,847,466,617
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						90,600,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							90,600,000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	90,600,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	90,600,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						314,267,050	Administrasi Umum Perangkat Daerah							314,267,050
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	184,267,050	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	184,267,050	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50,000,000	
	Pengadaan Mebel	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	50,000,000	Pengadaan Mebel	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						566,456,567	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						566,456,567	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,000,000	

Rancangan Awal RKPD							Analisa Kebutuhan						
Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	546,456,567	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	546,456,567
Pemeliharaan Barang Milik Daerah						326,143,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						326,143,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	100,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	86,923,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	86,923,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	139,220,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	139,220,000
Peningkatan Pelayanan						3,500,000,000	Peningkatan Pelayanan						3,500,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase layanan BLUD yang dilakukan	100 %	3,500,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase layanan BLUD yang dilakukan	100 %	3,500,000,000

REKAPAN	
1 Dinas Kesehatan	196,214,132,998
2 UPTD Laboratorium Ke	8,950,000,000
3 UPTD BKIM	5,796,482,000
4 UPTD BKOM	4,145,527,590
5 UPTD RS Paru	19,651,754,412
JUMLAH	234,757,897,000

No	EKAPAN PERPROGRA	Rancangan RKPD	Kebutuhan	Catatan Penting
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63,892,938,000	75,560,073,307	Ada penambahan anggaran untuk kebutuhan P3K dan Gaji PNS yang pindah
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	166,515,651,000	153,058,515,693	Pengurangan anggaran pada program ini untuk memenuhi kebutuhan gaji dan P3K dan program pemberdayaan kesehatan (Germas)
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,755,512,000	1,755,512,000	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	164,664,000	164,664,000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2,429,132,000	4,229,132,000	Penambahan kegiatan untuk kegiatan germas untuk pencegahan stunting
		234,757,897,000	234,757,897,000	

Tabel T-C.33
Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun
Provinsi Sumatera Barat
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Sumatera Barat

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolok Ukur	Target	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				196,214,132,998					157.911.949.567,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				57,846,390,557					1.567.675.349,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				566,953,909					609.106.775,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	441,114,239	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	609.106.775,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	65,839,670	DAU		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	72.423.637,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	60,000,000	DAU		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	66.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20,000,000	DAU				45.100.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10,000,000	DAU		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	217 Orang	35.000.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10,000,000	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	10.100.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				50,325,078,079	DAU				55.357.585.886,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	49,689,855,149	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	54.658.840.663,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	518,820,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	570.702.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	62,322,330	DAU		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	68.554.563,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	54,080,600	DAU		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	-	59.488.660,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				453,762,600	DAU				499.138.860,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	205,030,000	DAU		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	225.533.000,00
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	248,732,600	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	273.605.860,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				350,000,000	DAU				385.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	100 %	350,000,000	DAU		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	385.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,219,151,849	DAU				537.598.458,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	100 %	47,590,060	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	52.349.066,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	100 %	58,489,585	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	64.338.543,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	100 %	45,314,000	DAU		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	49.845.400,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	100 %	201,246,250	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	221.370.875,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	100 %	41,720,000	DAU		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	45.892.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	100 %	33,940,000	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	37.334.000,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	60,425,977	DAU		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	66.468.574,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolok Ukur	Target	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	730,425,977	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	913.468.574,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				870,000,000	DAU				950.000.000,00
	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	100 %	570,000,000	DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	620.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	100 %	300,000,000	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	330.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,421,344,120	DAU				2.663.478.531,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	100 %	36,465,002	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	40.111.502,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	100 %	744,600,000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	819.060.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	100 %	1.640,279,118	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1.804.307.029,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,620,100,000	DAU				2.332.110.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	100 %	377,000,000	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	634.700.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	100 %	1,000,000,000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.100.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	243,100,000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	597.410.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				132,484,540,341	DAU				151.352.751.908,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				4,175,792,500	DAU				4.748.770.100,00
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi <u>Persentase terselenggaranya sistem</u>	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	586,001,500	DAU		Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan	800.000.000,00
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi <u>Persentase terselenggaranya sistem</u>	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	154,146,000	DAU		Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	169.560.600,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolok Ukur	Target	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	3,435,645,000	DAU		Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	-	3.779.209.500,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				126,694,404,941	DAU				144.518.204.618,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	525,786,000	DAU		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1000 Orang	908.364.600,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	203,110,924	DAU		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64000 Orang	553.422.016,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	836,770,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3 Dokumen	1.020.447.008,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolak Ukur	Target	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	507,029,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	2 Dokumen	617.732.870,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	4,349,909,982	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	7.518.400.980,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	239,118,730	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	283.030.603,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	224,670,650	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	797.137.715,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolok Ukur	Target	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	250,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	285.000.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	108,598,450			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	339.458.295,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	443,129,965	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	817.442.961,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	277,580,900	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	195.338.990,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolok Ukur	Target	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	142,538,500	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	156.792.350,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	577,112,300	DAU		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	1000 Orang	964.823.530,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	559,333,700	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3 Dokumen	615.267.114,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	115,815,560,300	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	127.397.116.330,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolok Ukur	Target	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	340,989,980	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	375.088.978,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	250,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	2 Dokumen	275.000.000,00
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	397,925,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	617.716.022,00
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	107,485,060	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	2 Dokumen	118.233.566,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolok Ukur	Target	
	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	250,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	395.859.640,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	287,755,500	DAU		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	19 Keluarga	306.531.050,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				1,014,342,900	DAU				1.425.777.190,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	272,427,650	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2 Dokumen	289.670.415,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	176,856,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	184.541.600,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolok Ukur	Target	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	565,059,250	DAU		Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	6 Unit	951.565.175,00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				600,000,000	DAU				660.000.000,00
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	300,000,000	DAU		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	30 Unit	330.000.000,00
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	300,000,000	DAU		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	30 Unit	330.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1,489,406,100	DAU				1.638.346.710,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				288,084,250	DAU				316.892.675,00
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A strata 530 Orang 87 %	288,084,250	DAU		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-	316.892.675,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				1,201,321,850	DAU				1.321.454.035,00
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A strata 530 Orang 87 %	856,709,100	DAU		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	942.380.010,00
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A strata 530 Orang 87 %	344,612,750	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	379.074.025,00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				164,664,000	DAU				181.130.400,00
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				52,121,400	DAU				57.333.540,00
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	52,121,400	DAU		Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	-	57.333.540,00
	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				112,542,600	DAU				
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	112,542,600	DAU		Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	-	123.796.860,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				4,229,132,000	DAU				3.172.045.200,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				2,846,789,200	DAU				2.031.468.120,00
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 kabupaten/kota 11 % 11 %	2,846,789,200	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	4 Dokumen	2.031.468.120,00
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi				821,002,220	DAU				573.102.442,00
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang menerapkan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 kabupaten/kota 11 % 11 %	821,002,220	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	573.102.442,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tokol Ukur	Target	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi				561,340,580	DAU				567.474.638,00
	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 kabupaten/kota 11 % 11 %	561,340,580	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	2 Dokumen	567.474.638,00
	UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat					DAU				10.291.215.203,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,950,000,000	DAU				3.691.215.203,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2,950,000,000	DAU				3.691.215.203,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2,770,000,000	DAU				3.412.000.000,00
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	250,000,000	DAU		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	275.000.000,00
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	100,000,000	DAU		Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	250.000.000,00
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	170,000,000	DAU		Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	1 Paket	187.000.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolok Ukur	Target	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	2,000,000,000			Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	30 Unit	2.200.000.000,00
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	250,000,000	DAU		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4 Unit	500.000.000,00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				180,000,000	DAU				279.215.203,00
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 14 % 76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 %	180,000,000	DAU		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	3 Unit	279.215.203,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6,000,000,000	DAU				6.600.000.000,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD					DAU				6.600.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	6,000,000,000	DAU		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6.600.000.000,00
	UPTD BKOM & Pelkes									5.909.633.972,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				919,687,557	DAU				2.251.209.937,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				759,606,900	DAU				2.075.121.214,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolok Ukur	Target	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	190,512,000	DAU		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	874.116.824,00
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	350,000,000			Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	800.000.000,00
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	69,094,900			Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	2 Paket	76.004.390,00
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	150,000,000			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	5 Unit	325.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				81,800,000					89.980.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolok Ukur	Target	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi <u>Persentase terselenggaranya sistem</u>	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	81,800,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	89.980.000,00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				78,280,657	DAU				86.108.723,00
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	78,280,657	DAU		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2 Unit	86.108.723,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				266,105,900	DAU				292.716.490,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				266,105,900	DAU				292.716.490,00
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A strata 530 Orang 87 %	266,105,900	DAU		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	292.716.490,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2,959,734,133	DAU				3.365.707.545,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				70,000,000	DAU				77.000.000,00
	Pengadaan Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	100 %	70,000,000	DAU		Jumlah Paket Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35 Paket	77.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				172,488,800	DAU				189.737.680,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	100 %	28,895,600	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.785.160,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	100 %	20,383,200	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.421.520,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	100 %	68,574,000	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.431.400,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	100 %	20,800,000	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.880.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	100 %	4,320,000	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.752.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	29,516,000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	32.467.600,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				120,000,000	DAU				132.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	120,000,000	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	132.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,018,423,182	DAU				1.230.265.499,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tokol Ukur	Target	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	15,960,000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.556.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	345,032,064	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	379.535.270,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	657,431,118	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	833.174.229,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,578,822,151	DAU				1.736.704.366,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	28,200,000	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	31.020.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1,500,000,000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.650.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50,622,151	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	55.684.366,00
	UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat									9.601.130.200,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1,900,000,000	DAU				5.315.000.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1,500,000,000	DAU				4.875.000.000,00
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	350,000,000	DAU		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	385.000.000,00
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	500,000,000	DAU		Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	550.000.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tokol Ukur	Target	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	250,000,000	DAU		Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	1 Paket	275.000.000,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	250,000,000			Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit	3.500.000.000,00
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	150,000,000	DAU		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	165.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				250,000,000	DAU				275.000.000,00
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpicil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8,7 % 76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	250,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4 Dokumen	275.000.000,00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				150,000,000	DAU				165.000.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tokok Ukur	Target	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	150,000,000	DAU		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	165.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3,896,482,000	DAU				4.286.130.200,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				86,482,000	DAU				95.130.200,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	86,482,000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	95.130.200,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150,000,000	DAU				165.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	150,000,000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				160,000,000	DAU				176.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100,000,000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	110.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	60,000,000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	66.000.000,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD				3,500,000,000	DAU				3.850.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3,500,000,000	DAU		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.850.000.000,00
	UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat									31.674.080.921,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				14,804,287,795	DAU				25.107.989.023,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				11,235,409,795	DAU				21.182.223.223,00
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	6,364,403,976	DAU		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	13.874.116.823,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolak Ukur	Target	
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	1,250,000,000	DAU		Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1.650.000.000,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	1,000,000,000			Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	4 Unit	2.500.000.000,00
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	500,000,000	DAU		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit	825.000.000,00
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	2,121,005,819	DAU		Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	2.333.106.400,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				3,299,222,000					3.629.144.200,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target kinerja Capaian Program	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolak Ukur	Target	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	60,070,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	66.077.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	10,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	11.000.000,00
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	3,229,152,000			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	3.552.067.200,00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				269,656,000	DAU				296.621.600,00
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase terselenggaranya sistem	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 % 78 Per 100.000 2 daerah 6 kabupaten/kota 18 kabupaten/kota 38 % 100 % 96 % 8,7 % 83 % 100 % 89,47 % 100 % 14 %	269,656,000	DAU		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	296.621.600,00